BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 127/PDT.G/2015/PA.BJB, 223/PDT.G/2015/PA.BJB, DAN 186/PDT.G/2017/PA.BJB PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

A. Analisis Latar Belakang “Kekhawatiran Berbuat diLarang Oleh Norma Agama” sebagai Alasan Poligami

Pada ketiga putusan yang menjadi bahan hukum penelitian diketahui bahwa keseluruhan putusan memiliki dasar alasan permohonan yang sama, yakni kekhawatiran untuk dilarang oleh norma agama. Kekhawatiran tersebut ialah khawatir untuk berbuat zina ketika para pemohon tidak diizinkan untuk menikah, dalam hal ini berpoligami. Adapun masing-masing alasan utama poligami ketiga putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2015/Pa.Bjb bahwa Pemohon bermaksud berpoligami/menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXXX umur 37 tahun. Karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara maksimal terhadap Pemohon karena Pemohon yang sering bepergian ke luar daerah untuk pengajian dan Termohon tidak mampu ikut serta mendampingi Pemohon serta Pemohon khawatir bila ada fitnah dan timbul hal-hal yang tidak diinginkan selama Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon karena antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon adalah mantan istri teman Pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.
- b. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2015/Pa.Bjb bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Izin Poligami/menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX Umur 39 tahun, karena Pemohon khawatir bila ada

fitnah yang tidak diinginkan karena antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon adalah teman. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

- c. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2017/Pa.Bjb bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Izin Poligami/menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX Umur 31 tahun, karena Pemohon khawatir bila ada fitnah dan timbul hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon karena Pemohon adalah pelatih renang dan calon istri kedua Pemohon adalah atlet yang dilatih oleh Pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Jika memperhatikan pada Putusan Nomor 233/Pdt.G/2015/PA.Bjb bahwa Pemohon khawatir ketika terjadi fitnah yang tidak diinginkan dan melakukan perbuatan yang dilarang norma agama. Meninjau hal ini pada dasarnya alasan poligami baik dalam ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi. Alasan poligami dalam dua ketentuan tersebut setidaknya memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Setidaknya duduk perkara atau posita mengandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Etika, artinya bahwa duduk perkara dibuat dengan bahasa yang baik dan tidak merendahkan.
- b. Estetika, artinya memiliki bahasa yang mudah untuk dipahami.

- c. Bahasa baku, artinya memiliki kalimat yang jelas dan tidak berbelit-belit.
- d. Memilih kata-kata yang tidak bermakna ganda, sehingga dapat dihindari perbedaan penafsiran antara penggugat, tergugat dan hakim.
- e. Konsisten dalam menggunakan istilah, artinya tidak menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk hal tertentu, misalnya, tim 9, panitia IX, ketua, pimpinan, pemimpin, tanah sengketa, objek perkara, tanah terperkara dan lain-lain.
- f. Sinkron artinya tidak kontradiktif diantara bagian-bagian posita maupun dengan petitum.
- g. Menggunakan kalimat yang bermakna hubungan sebab akibat (kausal) artinya fakta hukum yang ditampilkan dalam kalimat awal, akan membawa akibat hukum yang diuraikan dalam kalimat berikutnya, misalnya: oleh karena tergugat menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- h. Menyusun posita dengan menggunakan kronologi peristiwa hukum, untuk memudahkan pemahaman yang runtut, guna meyakinkan hakim akan alasan hak yang sah bagi penggugat, dengan memberi nomor urut untuk masing-masing alinea, serta memberi nomor halaman untuk setiap lembar kertas yang digunakan.⁵⁵

Kemudian hal menarik adalah bahwa alasan khawatir berbuat dilarang oleh agama ini dikomulasikan dengan adanya kekhawatiran fitnah dari masyarakat. Atas dasar dorongan tersebut alasan inilah dijadikan alasan untuk berpoligami diiringi adanya izin istri. Dari alasan yang diajukan sebagai duduk perkara atau

⁵⁵ Achmad Fauzan dan Suhertanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri* (Bandung: Y. Rama Widya, 2007), hlm. 60.

alasan untuk berpoligami dari ketiga putusan yang ada, sama sekali tidak memiliki dasar ketentuan dalam hukum positif maupun ketentuan hukum Islam di Indonesia.

Atas dasar tersebut nampak jelas bahwa alasan untuk khawatir berbuat dilarang oleh agama tidak termasuk dari alasan berpoligami. Alasan poligami yang bisa dikategorikan dalam hal ini hanyalah alasan poligami dalam ketentuan hukum Islam. Meskipun tidak dijelaskan secara khusus dalam Al-Qur'an akan tetapi Q.S. An-Nisa/4: 3. Menjadi penentu kebolehan dan alasan poligami.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

“kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁵⁶

Sayyid Qutub dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa poligami ialah perbuatan rukhsah, karena itulah poligami harus dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak atau bahkan darurat⁵⁷. Jika memperhatikan pendapat ini keadaan darurat dapat dikategorikan salah satunya kekhawatiran berbuat zina atau sesuatu yang dilarang oleh agama. Inilah yang menjadi dasar permohonan izin poligami pada perkara Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Bjb dan Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.Bjb. Adapun untuk perkara Nomor 223 /Pdt.G/2015/PA.Bjb juga memiliki alasan yang sama ditambah kekhawatiran fitnah dari masyarakat. Dari hal ini menunjukkan bahwa duduk perkara atau alasan pengajuan poligami tersebut memiliki alasan yang berdasar. Meskipun tidak diakomodir dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 61.

⁵⁷ Sayyid Qutub, *Fi Dhilal Al-Qur'an Juz 4* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961), hlm. 236

Selanjutnya memperhatikan alasan pengajuan poligami pada dasarnya juga harus diiringi oleh beberapa syarat. Wahbah Zuhaily menjelaskan ada beberapa hal yang harus dipenuhi ketika ingin berpoligami:

- a. Adanya kesanggupan untuk adil terhadap para istri. Ini yang dimaksud dengan prioritas utama dalam poligami. Ketika hal ini tidak dapat dilakukan maka kebolehan poligami akan tertutup rapat-rapat.
- b. Adanya kesanggupan nafkah untuk para istri. Ini juga memperhatikan kehalalan dalam perkawinan yang paling utama didasari atas kemampuan nafkah. Ketika hal tersebut berlaku bagi perkawinan biasa maka juga berlaku untuk poligami.

B. Analisis Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru

Berdasarkan ketiga pertimbangan Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki adanya kesamaan. Kesamaan tersebut bahwa dalam mempertimbangkan alasan pengajuan poligami, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan syarat kumulatif yang terbuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 KHI.

Majelis mempertimbangkan hukum perkawinan dan menentukan adanya tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pemohon telah menyerahkan ketiga syarat kumulatif yaitu surat pernyataan tentang adanya persetujuan dari istri/istri-istri; surat pernyataan tentang adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan surat pernyataan tentang adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri –istri dan anak-anak mereka.

Dengan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut nampak seolah menjadikan alasan kekhawatiran termasuk alasan poligami di luar alasan yang telah ditentukan oleh hukum perkawinan di Indonesia. Ini justru akan menjadikan adanya ketentuan hukum baru terkait dengan alasan poligami di Indonesia. Sedangkan hukum perkawinan di Indonesia hanya menentukan tiga alasan poligami yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Artinya dengan adanya putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah melakukan ijtihad atau penemuan hukum sehingga mengesampingkan syarat poligami yang telah diatur tersebut.

Selanjutnya ketika memahami isi pertimbangan dalam tiga putusan Pengadilan Agama Banjarbaru nampak menunjukkan ijtihad tersebut lebih kepada aspek kemaslahatan dan kemampuan suami sebagai syarat kumulatif. Artinya meskipun majelis hakim mengesampingkan alasan poligami dalam hukum perkawinan, hal yang lebih utama dalam berpoligami bukanlah terletak pada alasan melainkan keadaan. Keadaan yang dimaksud dalam hal ini ialah

kemampuan suami untuk berpoligami sebagaimana syarat kumulatif. Ketika syarat tersebut telah terpenuhi khususnya izin atau kerelaan dari istri, maka wajar poligami diberikan izin.

Adapun yang menjadi perhatian adalah pada sebuah produk hukum tentu harus mencerminkan tidak hanya nilai keadilan tetapi juga kepastian hukum. Artinya bahwa dalam ketiga putusan Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap izin poligami juga harus memperhatikan aspek materil dan tidak hanya aspek formal. Sehingga adanya kejelasan akan penggunaan hukum khususnya alasan poligami. Minimal ada penjelasan dari sebuah produk hukum putusan dengan Pertimbangan yang jelas ketika mengesampingkan aspek materil dan mengedepankan aspek formil.

Mukti Arto menjelaskan bahwa pertimbangan hakim ialah aspek paling penting guna memberikan nilai dari sebuah produk hukum yang mengandung akan keadilan serta kepastian hukum. Selain itu pertimbangan hukum juga harus mengandung nilai manfaat bagi para pihak dan disikapi dengan baik, teliti, serta cermat.⁵⁸

Pentingnya pertimbangan hukum yang jelas tentu akan memberikan kepastian hukum itu sendiri. Pasalnya dari ketiga putusan tersebut sama sekali tidak ada pertimbangan yang menjelaskan bahwa hakim lebih mengedepankan syarat kumulatif dibandingkan syarat alternatif dalam berpoligami. Pada isi pertimbangan hanya disebutkan bahwa berdasarkan telah terpenuhinya syarat kumulatif sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang, maka Majelis dapat memberikan izin poligami. Dengan ini Majelis kemudian tidak lagi memperhatikan alasan kekhawatiran berbuat hal yang dilarang oleh norma agama ataupun alasan kekhawatiran fitnah di masyarakat.

⁵⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

Ecep Nurjamal menjelaskan bahwa hakim pada dasarnya harus meletakkan dasar pertimbangan yang ideal pada putusannya atau disebut dengan *motivating plitch* sebagaimana termuat pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵⁹ Sehingga dalam putusannya atau penetapannya hakim memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak. Selain itu berdasarkan pada aspek idealis bahwa berkaitan dengan mutu putusan, yakni tertata dengan baik, sistematis, runtut, tidak memuat istilah-istilah yang multitafsir, mengandung kejelasan, mengandung pertimbangan hukum yang normatif dan argumentatif, dan mengandung pembaruan hukum.⁶⁰

Kemudian pertimbangan Majelis Hakim yang mengedepankan kemampuan ini juga memperhatikan ketentuan adil yang menjadi syarat utama dalam berpoligami. Terhadap persyaratan jaminan adanya perlakuan adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, Majelis Hakim berpendapat adanya surat pernyataan sanggup berlaku adil telah cukup untuk membuktikannya oleh karena perkawinan kedua ini belum dijalankan sehingga perlakuan adil atau tidak belum dapat diukur, sehingga janji dari seorang muslim cukuplah menjadi jaminan apalagi untuk berbuat benar dan berbuat adil adalah sangat sulit sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah swt... dalam Q.S. An-Nisa/4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁶¹

⁵⁹ Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 10.

⁶⁰ A. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 85.

⁶¹ Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 78.

Memperhatikan bahwa ketentuan poligami dalam hukum Islam benar-benar memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan dari istri. Ketentuan dalam Q.S. An-Nisa/4: 3 merupakan ketentuan mutlak yang harus dipenuhi disamping alasan ingin berpoligami. Penjelasan ini didukung oleh pendapat Quraish Shihab bahwa adil yang dimaksud pada Q.S. An-Nisa/4: 3 bukanlah adil yang dapat diwujudkan oleh hati, melainkan keadilan yang tidak dapat diwujudkan dalam cinta melainkan perbuatan.⁶² Pendapat ini juga didukung oleh Sayyid Qutub bahwa adil dalam poligami adalah sebuah syarat mutlak. Keadilan yang dituntut ialah keadilan dalam hal nafkah, muamalah, pergaulan, serta pembagian malam.⁶³

Sebagaimana kemudian dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4: 129 terkait dengan larangan berpoligami ketika tidak adanya kemampuan. Dari hal ini juga diketahui bahwa ketentuan hukum Islam memang benar-benar memperhatikan aspek kemampuan dibandingkan alasan untuk berpoligami. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd bahwa kewajiban berlaku adil bagi para istri dalam berpoligami merupakan hal wajib yang tidak dapat ditawar lagi.⁶⁴

Ketika seseorang mampu untuk berpoligami dengan terpenuhinya syarat keadilan dapat menunjukkan bahwa adanya kebolehan untuk melakukan poligami sebagaimana yang ada pada ketiga Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru. Ini juga didukung oleh Yusuf Qardhawi bahwa adil dalam poligami berkaitan dengan adanya keyakinan. Ketika suami yakni akan dirinya untuk bisa berlaku adil maka poligami boleh untuknya. Sebaliknya, ketika tidak ada keyakinan pada dirinya untuk dapat berlaku adil maka poligami haram baginya.⁶⁵

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 338.

⁶³ Sayyid Qutub, *op.cit*, hlm. 236.

⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Fi Nihayah, Al Muqtashid Juz 2*, (Beirut: Daar Al Fikr, t.t)m, h. 42.

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), hlm. 214.

Meskipun begitu, sebagai sebuah produk hukum yang mengikat kepada para pihak tentu sebuah putusan harus tetap memberikan kejelasan kepastian terhadap berbagai pertimbangan yang dibuat. Setidaknya sebuah putusan hakim yang ideal memenuhi beberapa hal sebagai berikut: ⁶⁶

- a. Dapat mendeskripsikan fakta hukum secara konkrit dan kronologis berdasarkan hukum kuasalitas atas objek perkara yang terjadi pada saat putusan itu dijatuhkan sebagai hasil pemeriksaan dan pembuktian.
- b. Dapat mendeskripsikan fakta hukum yang hendak diwujudkan melalui amar putusan itu.
- c. Dapat menjawab setiap petitum dari petitum, tanpa terkecuali, berdasarkan pertimbangan hukum yang lengkap, logis, dan yutidis.
- d. Terdapat kejelasan petitum mana yang dikabulkan, petitum mana yang ditolak, dan petitum mana yang dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Dapat merealisasikan terwujudnya keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atas objek perkara sesuai standar baku keadilan.
- f. Dapat memberi perlindungan hukum keadilan kepada pihak-pihak dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi meskipun tidak ada permintaan dalam petitum.
- g. Terbebas dari hambatan yuridis untuk dieksekusi sehingga dapat dieksekusi dengan cara-cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan agar pencari keadilan pun dapat dengan mudah memperoleh keadilan.
- h. Ditampilkan secara sistematis, runtut, jelas, lugas, tegas, rinci, dan pasti.
- i. Dikemas dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah tata bahasa Indonesia yang baku serta dengan tata penulisan yang rapi sesuai ejaan bahasa Indonesia yang diperbarui.

⁶⁶ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Togyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 306-307.